

Tragedi 13 Mei 1969 dalam Berbagai Perspektif

Muhammad Hasmi Yanuardi¹, Ahmad Musyalen Firdaus²

Universitas Negeri Jakarta^{1,2}.

Email: 1mhasmiyanuardi@unj.ac.id, 2musyalen@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to describe the May 13, 1969 Tragedy according to various existing perspectives. The method used in writing this article uses stages that are usually standard in historical research, such as starting from selecting topics, gathering sources, verifying which contains historical criticism and the validity of sources, then proceeding to the interpretation stage and ending with writing. The results of this study are that the May 13, 1969 Tragedy was an event of racial riots between ethnic Malays and ethnic Chinese in Malaysia, especially in Kuala Lumpur, Selangor. The incident which was the result of the Opposition Party's victory march consisting of the Malaysian People's Movement Party (Parti Gerakan) and the Democratic Action Party (DAP) resulted in riots that paralyzed the country. In understanding this event, there are several perspectives such as originating from the Official Sources of the Malaysian Government, the existence of provocation by the Communist group, the Government's failure to prosper the Malay ethnicity and the dynamics of Sino-Malay social and economic interaction. From several existing perspectives, it cannot be decided that the cause of the May 13, 1969 Tragedy was only due to a single cause but could also be caused by various triggering factors. These factors can be in the form of socio-economic inequality, political rivalry and security threats from communist groups.*

Keywords : *Riots, Chinese, Malay, 1969 Raya Election.*

Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Tragedi 13 Mei 1969 menurut berbagai perspektif yang ada. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan tahapan-tahapan yang lazimnya menjadi standard dalam penelitian sejarah seperti diawali dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi yang di dalamnya memuat atas kritik sejarah dan keabsahan sumber, kemudian dilanjutkan pada tahap interpretasi dan diakhiri dengan penulisan. Hasil penelitian ini adalah Tragedi 13 Mei 1969 merupakan peristiwa kerusuhan rasial antara etnis Melayu dengan etnis Tionghoa di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, Selangor. Peristiwa yang merupakan dampak pawai kemenangan Partai Oposisi yang terdiri dari Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Parti Gerakan) dan Democratic Action Party (DAP) mengakibatkan kerusuhan hingga melumpuhkan negara. Di dalam memahami peristiwa ini, terdapat beberapa perspektif seperti berasal dari Sumber Resmi Pemerintah Malaysia, adanya provokasi kelompok Komunis, Kegagalan Pemerintah dalam mensejahterakan etnis Melayu dan dinamika interaksi sosial dan ekonomi Sino-Melayu. Dari beberapa perspektif yang ada, tidak dapat diputuskan bahwa penyebab Tragedi 13 Mei 1969 hanya karena sebab tunggal tetapi dapat disebabkan juga dari berbagai faktor yang memicu. Faktor tersebut dapat berupa ketimpangan sosial-ekonomi, rivalitas politik dan ancaman keamanan dari kelompok komunis.

Kata kunci : Kerusuhan, Tionghoa, Melayu, Pilihan Raya 1969

PENDAHULUAN

Tragedi ini bermula setelah diumumkan hasilnya hasil Pilihan Raya Umum (PRU) pada 10 Mei 1969 di Malaysia Barat (Semenanjung Malaya) bahwa Parti Perikatan yang terdiri dari United Malay Nation Organization (UMNO), Malaysian Indian Congress (MIC) dan Malaysian Chinese Association (MCA) memenangi pemilihan tersebut. Namun demikian, kursi yang mereka peroleh berkurang dari Pilihan Raya sebelumnya di tahun 1964. Partai Oposisi seperti Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN), Democratic Action Party (DAP), People's Progressive Party (PPP) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) memperoleh kursi yang lebih banyak dari Pilihan Raya sebelumnya, walaupun mereka tidak menang secara mayoritas. Partai Oposisi mendapat kemenangan besar di Pulau Pinang, Selangor dan Kedah (Baker, 2018). Parti Gerakan dan DAP melakukan pawai kemenangan di Kuala Lumpur atas "kemenangan". Akan tetapi pawai tersebut malah menghasilkan kerusuhan di Kampong Baru yang kemudian menyebar hingga di berbagai daerah Selangor. Puncaknya ialah diberlakukannya jam malam dan keadaan Negara Darurat pada 16 Mei 1969. Karena keadaan darurat itu pula, maka Pilihan Raya Umum di Malaysia Timur (Sabah & Sarawak) ditunda.

Tragedi 13 Mei 1969 dikenang sebagai sejarah kelam Malaysia. Tragedi ini mengakibatkan 196 orang tewas dan 439 orang luka-luka sehingga disebut sebagai kerusuhan rasial terburuk di Malaysia. Peristiwa ini masih menimbulkan pertanyaan bagi rakyat Malaysia, yakni latar belakang terjadinya peristiwa dan siapakah yang bertanggungjawab

dalam peristiwa itu. Karena hal tersebut yang menjadikan dasar penulis untuk peneliti melakukan penelitian terkait Tragedi 13 Mei 1969. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, peneliti mengkaji beberapa tokoh yang mengulas pertanyaan tersebut. Mereka adalah Tengku Abdul Rahman Putra, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan Leon Comber. Dalam mengkaji pemikiran beberapa tokoh tersebut, peneliti menggunakan sumber-sumber sekunder berupa buku-buku yang mereka tulis. Sebagai sumber primer, peneliti menjadikan sumber Majelis Gerakan Negara (Mageran) sebagai sumber utama dalam melihat perspektif tokoh yang dikaji. Dalam meneliti Tragedi 13 Mei 1969 peneliti menggunakan pendekatan historis. Dengan pendekatan historis maka peneliti melihat tragedi tersebut sebagai sebuah peristiwa sejarah yang berdasarkan pengalaman, penghayatan dan penyerapan (Kuntowijoyo, 2013). Karena hal itu yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengkaji tragedi tersebut berdasarkan perspektif tokoh-tokoh tertentu.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mempertimbangkan beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama adalah artikel ilmiah yang ditulis oleh Mohamad Asrol Arpidi Mamat, Ishak Saat, Ahmad Zainudin Husin dan Ruhaizan Sulaiman yang berjudul "*Involvement of The Communist Era in 13 Mei 1969 Racial Riot*". Artikel yang dipublikasikan dalam *International Journal of Academic Research in Progressive Education & Development* ini membahas bagaimana kelompok komunis terlibat dalam Tragedi 13 Mei 1969. Penelitian relevan kedua adalah e-prosiding *Persidangan Antarbangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan 2018* yang berjudul "*Dinamika Pembentukan Komuniti Dalam Sejarah Malaysia: Pelajaran Dari Peristiwa 13 Mei 1969*". Prosiding yang ditulis oleh Nor Azlah Sham

Rambely dan Mohamed Ali Haniffa ini membahas pembelajaran dari dampak Peristiwa 13 Mei 1969 terhadap pembentukan komunitas di Malaysia. Dalam pembahasan penyebab Peristiwa 13 Mei 1969 terjadi, terlihat persamaan dengan rancangan penulisan yang peneliti lakukan. Namun dalam penulisan peneliti terdapat perbedaan dimana penyebutan penyebab terjadinya tragedi tersebut berdasarkan pandangan khusus tokoh tersebut dan tidak menyebut secara umum.

Dengan beberapa pertimbangan tersebut peneliti berharap dapat mendeskripsikan penyebab-penyebab terjadinya Tragedi 13 Mei 1969 berdasarkan perspektif terkait. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat berguna sebagai referensi sejarah Asia Tenggara khususnya Malaysia & Singapura dan Sejarah Masyarakat Multikultural. Dalam implementasi kehidupan sehari-hari, penelitian ini dapat memberikan sebuah nilai betapa pentingnya persatuan dan kesatuan masyarakat yang memiliki perbedaan secara etnis dan agama serta perlu menghindari hal-hal yang dapat memprovokasi kepada hal-hal yang memecahbelah kesatuan dan persatuan yang telah ada.

METODE

Dalam membahas perspektif ketiga tokoh tersebut, penulis menggunakan metode kesejarahan atau historis. Metode kesejarahan memiliki lima tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian penulisan sejarah. Penelitian sejarah memiliki beberapa tahapan seperti pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), interpretasi yakni mengandung analisis dan sintesis, kemudian yang terakhir adalah penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Dalam

tahapan pengumpulan sumber atau dalam istilah lainnya adalah heuristik yang bermakna melakukan kegiatan bibliografis atau studi pustaka karena penulisan ini akan menggunakan berbagai buku yang tercetak (Gottschalk, 2015) menjadi sumber utama dalam membahas perspektif ketiga tokoh mengenai Tragedi 13 Mei 1969. Sumber-sumber yang digunakan dalam studi pustaka adalah buku-buku maupun artikel ilmiah yang terkait dengan pembahasan penulis. Menggunakan metode kesejarahan, penulis dapat meneliti dan menuliskannya dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan dan juga dapat menjelaskan secara deskriptif.

Perspektif Resmi Malaysia dalam Laporan Majlis Gerakan Negara (MAGERAN)

Pertentangan di antara kelompok Melayu dan kelompok Cina sudah timbul semenjak masa kolonial Inggris (baca: Britania) di Malaya. Hal itu pun terjadi di Pulau Pinang yang pada tahun 1957 sedianya berlangsung arak-arakan memperingati 100 tahun kota Georgetown yang mana UMNO ternyata tidak bersedia mengambil bagian dalam acara perayaan tersebut. Bahkan kabar yang menyebarkan mengatakan bahwa orang-orang Melayu akan menghadang dan membubarkan arak-arakan itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelompok orang Melayu akan absen dalam acara perayaan kota. Bahkan saat terjadi kerusuhan, orang-orang Cina yang terlibat dalam perayaan tersebut berbalik melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan polisi yang dianggap bertujuan membubarkan arakan dan lebih berpihak kepada kaum Melayu. Di dalam peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah empat orang tewas dan 48 cedera (Majelis Gerakan Negara Malaysia, 1969).

Secara umum memang berdasarkan kenyataan konflik-konflik sosial di antara orang-orang Cina yang diwakili oleh “samseng” Cina (kongsi gelap) dan “samseng” Melayu di Pulau kerap terjadi yang dikenal dengan aktivitasnya mengutip uang keamanan. Sehingga konflik-konflik atau perkelahian sering terjadi di antara dua kelompok etnis tersebut. Pada tahun 1964 pun terjadi kerusuhan etnis yang terjadi di Bukit Mertajam yang masuk ke dalam wilayah Pulau Pinang, walau terletak di Daratan Semenanjung di antara orang-orang Cina dan Melayu. Kerusuhan berlangsung selama kurang lebih 10 hari dan beberapa orang yang terlibat akhirnya ditahan. Walau dalam keterangan laporan saat itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa partai-partai politik atau kelompok subversif yang terlibat. Namun diketahui bahwa tidak dipungkiri kalau anggota-anggota kongsi gelap telah mengambil kesempatan menakuti warga setempat dalam menarik uang keamanan (Majelis Gerakan Negara Malaysia, 1969).

Peristiwa yang memicu terjadinya Tragedi 13 Mei 1969, awalnya dimulainya arak-arakan di tanggal 11 dan 12 Mei 1969. Parti Gerakan dan DAP melakukan pawai “kemenangan” yang mengarah ke tindakan penghasutan dan memunculkan sentimen (perasaan-perasaan) perkauman (etnik) di Kuala Lumpur. Pawai “kemenangan” tersebut ternyata belum mendapat ijin dari pihak kepolisian. Peserta pawai “kemenangan” yang kebanyakan terdiri dari orang-orang Cina melibatkan 5 buah mobil dan lebih dari 15 buah sepeda motor untuk berkeliling kota melakukan pawai. Tindakan dan kata-kata yang cenderung mengarah munculnya sentimen rasialis salah satunya adalah di saat para peserta pawai melontarkan kata-kata seperti, “Apa polis boleh

buat -kita Raja”, “buang semua Polis Melayu”, “ Apa ini Melayu kita negeri dia sudah perentah. Ini negeri bukan Melayu punya”, “Melayu sudah jatuh, MARA boleh keluar”, pekik-pekik seperti “Melayu balek, pergi mati!” dan “ Melayu balek kampong MARA mahu kasi habis” kerap mereka pekikan di tengah-tengah arak-arakan (Majelis Gerakan Negara Malaysia, 1969).

Hal yang menjadi unsur pelanggaran dari pawai arak-arakan tersebut adalah adanya pelanggaran peraturan lalu lintas, ucapan-ucapan kasar dan provokatif yang dilontarkan kepada orang-orang Melayu. Namun, tindakan yang dilakukan para peserta pawai yang sudah mengarah ke tindakan yang dapat menimbulkan konflik rasialis (baca: etnik) ternyata tidak dikecam atau dicegah oleh pimpinan partai-partai oposisi, seperti Parti Gerakan dan DAP setidaknya mengecek apa yang dilakukan oleh para pendukungnya, namun hal tersebut pun tidak dilakukan.

Kelompok Melayu menganggap bahwa arak-arakan “kemenangan” dengan ejekan dan cemoohan yang dilakukan tersebut menunjukkan sikap kesombongan. Kelompok oposisi yang hanya berhasil mendapatkan beberapa kursi tambahan di parlemen yang diperoleh oleh bukan orang Melayu (khususnya bagi orang Cina) telah memunculkan sentimen rasialis yang mengarah ke konflik horisontal di masyarakat. Kelompok Melayu meminta pihak pemerintah untuk dapat bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok perusuh liar tersebut. Pihak UMNO di pagi hari 12 Mei 1969 di Kampong Bharu berkumpul dengan tujuan mengadakan perayaan arak-arakan yang bertujuan menunjukkan bahwa mereka pun tidak dikalahkan dalam Pilihan Raya. Di esok harinya, 13 Mei 1969,

terjadilah bentrok antar kelompok baik Melayu maupun non-Melayu (Cina dan India) (Majelis Gerakan Negara Malaysia, 1969).

Berdasarkan tugas Majelis Gerakan Negara dibentuk adalah untuk mengendalikan keadaan darurat negara dan mengembalikan negara kepada keadaan sedia kala. Beberapa upaya sudah dilakukan seperti mengembalikan keamanan dan peraturan. Namun untuk mengembalikan harmoni dan saling percaya di antara kelompok masyarakat memerlukan kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Sebab bila keharmonisan belum tercapai, maka demokrasi dalam sistem parlemen tidak akan berhasil terwujud. Di dalam kasus ini negara dianggap tidak boleh lagi mengalami peristiwa Tragedi 13 Mei.

Pengaruh Parti Komunis Malaya melalui Partai Oposisi (Tengku Abdul Rahman Putra)

Saat terjadi Tragedi 13 Mei 1969, Tengku Abdul Rahman Putra menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tengku menulis pengalaman dan pandangannya mengenai Peristiwa 13 Mei dalam buku yang berjudul *13 Mei, Sebelum dan Selepas*. Buku yang berisi 23 bab ini menjelaskan pengalaman Tengku di waktu sebelum dan sesudah tragedi tersebut terjadi. Menurut Tengku, penyebab dari peristiwa tersebut adalah pawai kemenangan Partai Oposisi (Parti Gerakan & DAP) atas hasil Pilihan Raya Umum 1969 di Malaysia Barat dan adanya pengaruh unsur komunis (Parti Komunis Malaya/PKM) yang berhasil mempengaruhi pemuda-pemuda Tionghoa untuk mendukung kampanye oposisi dan menyerang pemerintah di bawah Parti Perikatan (UMNO, MIC & MCA) (Rahman, 1969).

Pada masa kampanye, partai oposisi menggunakan sentimen etnis, agama dan kesenjangan ekonomi untuk mendapat dukungan masyarakat. PAS menggunakan sentimen etnis dan agama untuk mendapat dukungan dari masyarakat Melayu. Terlebih lagi, PAS selalu menggunakan nama Agama Islam dalam kampanye mereka. Sedangkan DAP, Parti Gerakan dan PPP menggunakan sentimen etnis dan kesenjangan ekonomi untuk mendapat dukungan dari masyarakat non-Melayu khususnya masyarakat Tionghoa. Menurut Tengku, pengaruh unsur komunis terdapat pada usaha-usaha untuk menghasut partai oposisi dalam menjelekkan pemerintah dan Parti Perikatan selama kampanye. Padahal, Parti Komunis Malaya sudah dinyatakan sebagai partai terlarang sejak Malaysia memberlakukan Keadaan Darurat pada tahun 1948 hingga 1960.

Aktivitas kelompok komunis tidak hanya semasa kampanye saja, tetapi jauh sebelum Pilihan Raya Umum 1969. Kelompok komunis menjalankan aksinya pada Peristiwa Hartal di Pulau Pinang (19 November 1967), Peristiwa Hukuman Gantung (1968), Pemboikotan Pilihan Raya (1969), arak-arakan jenazah Lim Soong Seng (9 Mei 1969) dan pawai kemenangan pada 12 Mei 1969. Dengan melihat peristiwa menjelang Tragedi 13 Mei, Tengku Abdul Rahman Putra lebih menekankan bahwa Tragedi 13 Mei 1969 merupakan Tindakan kelompok komunis untuk menjatuhkan martabat pemerintah melalui kegiatan-kegiatan menjelang PRU dan memprovokasi kampanye partai oposisi untuk menyerang pemerintah. Pernyataan tersebut juga disampaikan dengan maksud yang sama pada saat pidato kenegaraan yang mengumumkan Malaysia dalam Keadaan Darurat pada 16 Mei 1969. Provokasi kelompok Komunis juga dapat dibuktikan dengan adanya

laporan Komite Sentral PKM ke Beijing pada Agustus 1969 yang berencana melaksanakan "Policy of National Massacre" dan mengarahkan perlawanan kepada pertentangan kelas terhadap "Klik Tunku-Razak" dengan "Kebijakan Chauvinis Melayu" (Short, 1970).

Konflik komunal yang terjadi di tahun 1969 itu ada pula yang menganggap berkaitan dengan Revolusi Kebudayaan di Cina Daratan dimana kelompok ultraradikalisme setempat dari golongan etnik Cina dihubungkan dengan perilaku internasional Cina. Walaupun begitu, adapula yang tidak setuju bahwa Tragedi 13 Mei dikaitkan dengan aktivitas radikalisme di Cina Daratan selama Revolusi Kebudayaan. Ada yang menganggap bahwa Tragedi 13 Mei 1969 sebagai hasil konflik kelas sosial dan bukannya pertentangan etnik (Dahana, 2022).

Selain itu, partai oposisi seperti DAP juga disalahkan karena mereka membawa pernyataan yang menyakitkan hati masyarakat Melayu dan ternyata lebih mementingkan kepentingan etnis Tionghoa (kelompok *Chauvinis*). PAS tidak jauh berbeda dengan DAP karena mereka menjadikan Agama Islam sebagai alat politik untuk melawan pemerintah. Walaupun PAS juga melakukan kampanye provokatif terhadap pemerintah, stigma negatif terhadap Tragedi 13 Mei lebih banyak mengarah kepada DAP daripada PAS.

Kesalahan Pemerintah (Parti Perikatan) dan enggan melihat Sejarah Sino-Melayu di Malaya (Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dan Jim Baker)

Sejak Pilihan Raya Umum 1964, Dr. Mahathir bin Mohamad (saat itu belum mendapat gelar Tun ataupun Datuk Seri) menjadi anggota

parlemen mewakili UMNO Kota Setar Selatan serta menjadi *Ahli Majlis Tertinggi* UMNO pada tahun 1965. Pada Pilihan Raya Umum 1969, Mahathir kembali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen melawan calon dari PAS, Tuan Guru Haji Yusoff Rawa, akan tetapi Mahathir mengalami kekalahan dengan selisih tipis dari calon PAS.

Merasa dirugikan dengan kekalahannya, Mahathir mengirimkan surat keberatan kepada PM Tengku Abdul Rahman Putra. Mahathir mengatakan kalau Tragedi 13 Mei 1969 dan “kekalahan” Parti Perikatan terhadap Oposisi (terlebih di daerah Setar Selatan) merupakan salah Tengku yang gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri (Dahana, 2022). Karena tindakannya tersebut, melalui Persidangan Khas Majlis Tertinggi UMNO menyatakan untuk memecat Mahathir sebagai Ahli Majlis Tertinggi UMNO karena telah melanggar disiplin partai. Tengku berpendapat bahwa surat tersebut berisi fitnah terhadap dirinya. Dalam bukunya, Tengku menyebut Mahathir sebagai “Pelampau”.

Ketika tidak menjabat sebagai Ahli UMNO, Mahathir menulis sebuah buku kontroversi yang berjudul *The Malay Dilemma* (Dilema Melayu). Dalam buku tersebut, Mahathir membahas apa yang menyebabkan Tragedi 13 Mei dan juga mengenai kesenjangan kehidupan Melayu-Tionghoa/Sino-Melayu di Malaysia (Mohamad, 1982). *The Malay Dilemma* pun disambut negatif oleh Tengku hingga buku ini dilarang terbit di Malaysia pada awal tahun 1970an. Setelah Mahathir menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat, larangan buku *The Malay Dilemma* dicabut.

Dalam buku tersebut, bahasan mengenai Tragedi 13 Mei dibahas dalam bab "Apa Yang Salah?". Mahathir menuliskan bahwa Tragedi 13 Mei merupakan dampak dari pemerintahan Parti Perikatan dibawah PM Tengku Abdul Rahman yang korup dan sarat akan nepotisme. Hal ini juga diperparah dengan pemerintah yang tidak menghiraukan kritik yang disampaikan, baik oleh oposisi dan partai pendukungnya. Pemerintah pula mempertahankan pemisah antar etnis dengan tetap mengandalkan etnis Tionghoa dalam hal ekonomi dan Melayu dalam hal politik. Dengan begitu kesenjangan sosial ekonomi antara Sino-Melayu tidak berubah. Pemisahan tersebut sebenarnya adalah warisan dari jaman kolonial Inggris di Malaya, akan tetapi pemerintah sekarang malah tetap melanjutkan pemisahan tersebut.

Karena itulah tidak salah apabila banyak rakyat yang kecewa dengan pemerintah di bawah Parti Perikatan. Kekecewaan ini pun menguntungkan partai-partai oposisi. Walaupun mereka tidak mungkin menang tetapi perasaan anti-Perikatan membawa keuntungan bagi mereka. Mengenai Tragedi 13 Mei ataupun beberapa peristiwa sebelumnya (pengarakan jenazah Lim Soong Seng), pemerintah gagal untuk membendung terjadinya kerusuhan. Adalah tidak logis jika pemerintah tidak menginginkan keributan tetapi mengizinkan oposisi mengadakan pawai kemenangan.

Dengan demikian, pandangan Mahathir terhadap Tragedi 13 Mei tidak hanya melihat dari peristiwa kontemporer, melainkan juga melihat dari segi historis hubungan antara Melayu dan Tionghoa di Semenanjung Malaya. Mahathir juga melihat bagaimana kesalahan pemerintah Parti Perikatan dalam mengambil langkah kebijakan untuk Malaya (ketika

masih menjadi Federasi Tanah Melayu) dan Malaysia mengenai kesenjangan ekonomi. Bisa dikatakan masalah ini bermula dari kebijakan kolonial Inggris yang tidak diubah dan tetap dijalankan serta diperparah dengan sifat pemerintah yang hanya mementingkan kepentingan mereka agar tetap berkuasa.

Dalam tulisan lainnya terdapat pengaruh pemerintah yang nantinya menjadi latar belakang terjadinya Tragedi 13 Mei 1969. Pembahasan ini ditulis oleh Jim Baker dalam buku yang berjudul *Crossroad, A Popular History of Malaysia and Singapore*. Dalam buku tersebut, Baker menjelaskan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi ketegangan antara Sino-Melayu adalah Akta Bahasa Kebangsaan 1967 (Baker, 2018). Dalam kebijakan tersebut, secara garis besar, implementasi penggunaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional dilakukan secara perlahan dengan mengecualikan penggunaan Bahasa Melayu dalam beberapa bidang seperti pengadilan, pendidikan tinggi dan hal-hal tertentu lainnya (dalam hal ini menggunakan Bahasa Inggris). Dalam sekolah-sekolah negeri, pengajaran Bahasa Mandarin dilakukan secara lambat di jenjang sekolah menengah dan kemudian juga di sekolah dasar. Sedangkan dalam sekolah-sekolah swasta Tionghoa, Bahasa Mandarin tetap diajarkan dan digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar.

Akta Bahasa Kebangsaan 1967 tidak disenangi oleh beberapa kelompok etnis Melayu karena pemerintah tidak “segera” memberlakukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Nasional Malaysia. Dari kelompok Ultra-Nasionalis seperti Syed Jaafar Albar (Sekretaris Jenderal UMNO) dan kelompok sastra Melayu, mereka tidak senang jika Bahasa

Inggris tetap digunakan dalam keperluan resmi (Mutalib, 1996). Sedangkan beberapa kelompok etnis Tionghoa juga tidak menyetujui Akta Bahasa Kebangsaan 1967 karena mengancam warisan leluhur mereka apabila mereka menggunakan Bahasa Melayu. Alasan penolakan terhadap Akta Bahasa Kebangsaan 1967 juga karena tidak diterimanya desakan Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Nasional kedua setelah Bahasa Melayu (Hawkins & Drummond, 1969). Ketidaksetujuan terhadap Akta Bahasa Kebangsaan 1967 dimanfaatkan partai oposisi untuk menyerang pemerintah dalam kampanye mereka untuk Pilihan Raya Umum 1969.

Rasa tidak puas kelompok Melayu dengan pemerintah Parti Perikatan juga dilontarkan oleh Kelompok Ultra dengan alasan PM. Tunku Abdul Rahman selalu berkompromis dan terkesan “mengalah” dengan kelompok Tionghoa. UMNO Negeri Johor bahkan sempat menuduh Perdana Menteri terlalu lunak kepada Kelompok Tionghoa dan tidak peduli dengan perasaan kaum Melayu (Mutalib, 1996). Mengenai perasaan kaum Melayu, sebagai bukti, walaupun kaum Melayu menguasai 85% dari seluruh buruh pertanian dan 95% dari mata pencaharian petani namun hanya 20% petani Melayu tersebut yang memiliki tanah untuk ditanami sendiri. Itupun, pendapatan rata-rata petani Melayu hanya mendapatkan 50 Dollar Malaysia per bulan dan jumlah upah tersebut jauh dibawah upah penduduk perkotaan non-Melayu lainnya. Dalam hal itu pula, kecurigaan kelompok Melayu mengarah kepada pemerintah yang lebih mengakomodasi kepentingan non-Melayu, khususnya kelompok Tionghoa.

Selain itu, kampanye “Malaysian-Malaysia” juga menimbulkan ketegangan antara etnis Sino-Melayu. Kampanye “Malaysian-Malaysia”

merupakan kampanye yang dipoluerkan oleh People's Action Party (PAP) Singapura yang dipimpin oleh PM. Lee Kuan Yew dalam kampanye Pilihan Raya Umum 1964 di Malaysia Barat. Kampanye ini menitikberatkan kepada usaha untuk mencapai "keadilan sosial" melalui "Penyerataan" hak-hak semua etnis di Malaysia (Kementerian Kebudayaan Singapura, 1965). Kampanye ini mendapat dukungan dari kelompok-kelompok non-Melayu dan kelompok Sosialis Kanan. Namun kampanye ini mendapat tentangan yang kuat dari UMNO, khususnya para ekstrimis Melayu. Kampanye "Malaysian-Malaysia" juga menjadi salah satu alasan kenapa Kuala Lumpur mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965. Sisa-sisa kader PAP di Malaysia mempertahankan cita-cita tersebut dan mengubah nama mereka menjadi DAP.

Hasil Pilihan Raya Umum 1969 menunjukkan kemenangan Parti Perikatan, walaupun menang secara mayoritas namun tidak mendominasi kursi seperti dalam hasil Pilihan Raya Umum 1964. Parti Perikatan menang di Negeri Johor, Pahang dan Perlis. Beberapa partai oposisi menang di beberapa negeri seperti PAS (Kelantan), DAP (Perak, Negeri Sembilan, Melaka) dan GERAKAN (Penang) (PRU 1969 Di Malaysia Barat, 1970). Jumlah kursi di Negeri Selangor dan Perak berimbang dengan partai oposisi seperti DAP dan GERAKAN. UMNO kehilangan 7 kursi, MCA kehilangan 14 kursi dan MIC kehilangan 1 kursi (Wicks, 1971). MCA dalam hasilnya merasa telah kehilangan mandat dari komunitas Tionghoa di Malaysia. Hasil Pilihan Raya Umum 1969, bagi partai oposisi, merupakan bukti bahwa pemerintah (Parti Perikatan) mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Dan "kemenangan" tersebut dirayakan secara

berlebihan oleh beberapa partai oposisi sehingga memicu Tragedi 13 Mei 1969.

Bagian dinamika interaksi sosial dan ekonomi Sino-Melayu di Malaya (Leon Comber)

Leon Comber menulis sebuah buku yang berjudul *13 May 1969, The Darkest Day in Malaysian History*. Dalam membahas Tragedi 13 Mei 1969, Comber membawakan sudut pandang historis mengenai interaksi sosial dan ekonomi antara etnis Melayu dengan etnis Tionghoa di Semenanjung Malaya. Awal kedatangan etnis Tionghoa ke Malaya pada saat bangsa Eropa (Inggris) mulai mendominasi di Semenanjung Malaya (Comber, 2012). Dalam hal ini, mereka diperlukan oleh Inggris untuk menjadi pekerja kasar hingga menjadi pedagang dan ahli perniagaan. Pada mulanya mereka bekerja di Malaya hanya sementara dan nantinya akan kembali lagi ke Tiongkok. Akan tetapi, mereka memilih untuk menetap dan tidak ada keinginan untuk kembali ke negeri asal mereka.

Ketika diadakan sensus penduduk pada tahun 1931, hasil menunjukkan bahwa populasi antara etnis Melayu dengan non-Melayu (Tionghoa dan India/Tamil & Bengal) hampir sama, sebesar 49% dengan selisih 0,2%. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah kolonial Inggris membuat kebijakan dengan memberikan "Hak-hak khusus" kepada etnis Melayu. Mengenai perpaduan antar etnis, terdapat pemisahan yang menonjol antara Melayu dengan Tionghoa (selain pemisahan tempat antar mereka). Pemisah tersebut adalah sifat dari mereka yang sulit terbuka dan prasangka yang menyatakan etnis Tionghoa sebagai "Kafir" dan "orang

kaya” sedangkan etnis Melayu sebagai “pemalas”, “orang tidak berpunya” dan “rendahan” (Dahana, 2022).

Saat penjajahan Jepang di Malaya, Jepang lebih mendekatkan diri kepada Melayu untuk menghabisi etnis Tionghoa di Malaya. Kemudian, mereka diberikan hak politik yang lebih kuat, salah satunya dengan adanya konsep “Indonesia Raya”. Melayu merasa diuntungkan dengan kesempatan tersebut untuk mempertahankan kedudukan mereka dari etnis non-Melayu. Merasa terancam dan dihina, etnis Tionghoa mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang dengan mendirikan pasukan gerilya, yang kemudian berkembang menjadi kekuatan komunis.

Pasca kekalahan Jepang dan kembalinya Inggris di Malaya, isu kewarganegaraan menjadi perkara yang penting. Ini dikarenakan etnis Melayu yang enggan memberikan kewarganegaraan yang sama dengan etnis non-Melayu, maka itulah didirikan Federasi Tanah Melayu yang menggantikan Malayan Union. Dalam Federasi Tanah Melayu, hak istimewa Melayu dan pengakuan kedaulatan Sultan diakui oleh Inggris, berbeda dengan Malayan Union dengan konsep penyeteraan yang dianggap mengancam etnis Melayu dan menyisihkan kedaulatan Sultan di Tanah Melayu. Pada awal 1950an, wacana bahasa Melayu sebagai bahasa Nasional ditentang oleh Etnis Tionghoa yang dianggap menyampingkan etnis lain.

Setelah kemerdekaan Malaya pada tahun 1957 dan bergabungnya Sabah, Sarawak dan Singapura dalam Federasi Malaysia pada tahun 1963, hubungan antara Sino-Melayu semakin memanas dengan adanya Singapura yang dianggap hanya menambah populasi etnis Tionghoa dalam negara. Ditambah dengan sikap PM Singapura, Lee Kuan Yew

dalam hal penyetaraan etnis di Singapura dan konsep “Malaysian Malaysia” yang membuat para petinggi UMNO geram hingga akhirnya Singapura dikeluarkan dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Dengan adanya Konfrontasi yang dilakukan Indonesia sejak 1963 dan pergerakan PKM di Malaya yang masih bergerak di bawah tanah, menambah memanasnya hubungan Sino-Melayu.

Sejak 1957, pemerintah telah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Melayu (prioritas) dengan beberapa kebijakan, namun hasilnya tidak ada perubahan. Namun dalam kenyataannya, menguatkan penggambaran rasial bahwa Melayu menang dalam hal politik sedangkan Tionghoa dan India menang dalam hal ekonomi. Dengan demikian, tetap saja tidak ada yang berubah dalam kesejahteraan Melayu. Akhirnya kegagalan pemerintah digunakan partai oposisi untuk meraih dukungan pada Pilihan Raya Umum 1969 hingga terjadi Tragedi 13 Mei.

Dari tulisan tersebut, Comber memaparkan bahwa Tragedi 13 Mei tidak begitu saja terjadi. Ada sebuah peristiwa atau kebijakan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam hubungan Sino-Melayu di Malaysia dengan puncaknya adalah Tragedi 13 Mei 1969, baik dalam masa menjelang Pilihan Raya Umum ataupun pada awal kedatangan Inggris di Malaya (Comber, 2012).

KESIMPULAN

Setiap Negara memiliki sejarah kelam atau sejarah kontroversial. Jika Indonesia memiliki Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (Gestok), Singapura memiliki Kerusuhan Rasial 21 Juli 1964 dan Malaysia memiliki Peristiwa 13 Mei 1969. Dalam pemaparan sebelumnya dapat kita pahami

bahwa Peristiwa 13 Mei merupakan peristiwa kelam Malaysia dan sampai sekarang masih menimbulkan pertanyaan, terutama mengenai sudut pandang siapa yang bersalah.

Dalam memahami peristiwa tersebut, kita melihat beberapa pandangan yang berbeda ataupun saling melengkapi. PM. Tengku Abdul Rahman Putra dengan pandangannya yang mengatakan bahwa Komunislah yang bertanggung jawab, Dr. Mahathir Mohamad dengan pandangannya yang mengatakan bahwa Peristiwa 13 Mei merupakan kegagalan Pemerintah Parti Perikatan dibawah PM. Tengku Abdul Rahman Putra dan kegagalan memahami sejarah Malaya dan Leon Comber dengan pemaparan sejarah hubungan Sino-Melayu yang saling mempengaruhi hingga terjadinya Peristiwa 13 Mei (walaupun ia menggunakan pendapat PM Tengku untuk hasil akhirnya).

Dari semua padangan tersebut, pandangan PM Tengku Abdul Rahman Putra yang umum digunakan hingga saat ini. Dalam film Tanda Putera yang dimulai dengan Peristiwa 13 Mei dan digambarkan sesuai dengan apa yang Tengku tulis dalam bukunya. Dengan menggunakan pendapat Tengku, kita bisa menilai bahwa pandangan beliau terhadap Peristiwa 13 Mei lebih mengarah kepada kebijakan politik untuk menghadapi pengaruh Komunis di Malaysia (ditambah dengan situasi Perang Dingin, terutama di Asia Tenggara) dan Tengku tidak begitu membahas mengenai hubungan sosial antara Sino-Melayu.

Pandangan kegagalan pemerintah dalam pandangan Dr. Mahathir, diakibatkan pemerintah Parti Perikatan tidak berhasil menyeimbangkan kesenjangan sosial antara etnis Melayu dengan Tionghoa. Dengan melihat sejarah kedatangan mereka ke Malaya, Mahathir menilai ada warisan

kolonial yang memisahkan mereka. Membaca pandangan Comber, kita melihat Peristiwa 13 Mei sebagai dampak dari peristiwa sejarah sebelumnya yang tidak diperhatikan dan tidak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, baik masyarakat Melayu maupun Tionghoa.

Dengan demikian, peneliti lebih berpandangan bahwa beberapa perspektif tersebut menjadi suatu kesatuan yang dapat mengisi pembahasan Tragedi 13 Mei 1969. Dalam melihat peristiwa tersebut pun tidak terfokus dalam satu aspek saja (politik), akan tetapi ada aspek lainnya yang mempengaruhi (hubungan sosial). Dikhawatirkan nantinya Tragedi tersebut digunakan untuk tujuan politik, seperti yang dikatakan Jomo K.S. dalam Prakata di buku PM Tengku Abdul Rahman Putra edisi Bahasa Melayu.

Dengan memperhatikan dan memahami Tragedi 13 Mei 1969 dari beberapa perspektif tersebut, alangkah bijak untuk berkesimpulan bahwa tidak tepat untuk menyalahkan secara keseluruhan terhadap peristiwa tersebut kepada satu pihak dan tidak benar pula apabila pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap Tragedi 13 Mei 1969, baik mereka yang dipersepsikan sebagai kelompok Antagonis maupun Protagonis.

Setelah berlalunya Tragedi 13 Mei 1969, Pemerintah Malaysia mulai menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adanya gagasan Rukunegara dan kebijakan Dasar Ekonomi Baru dalam *Second Malaysian Plan 1971-1975* untuk mengurangi ketidakseimbangan perekonomian Sino-Melayu. Terkait ancaman Komunis, PM. Tun Abdul Razak memiliki cara lain seperti membuka hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat

Tiongkok pada tahun 1974. Cara tersebut cukup efektif dalam mengurangi aktivitas gerilya PKM di perbatasan Malaysia-Thailand hingga akhir dekade 1980an.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, H. S. S., & Musa, R. (2021). Sorotan Perjuangan Nasionalisme Melayu Mengikuti Perspektif Islam. *International Journal of Contemporary Education, Religious Studies and Humanities*, 1(2), 15–23.
- Baker, J. (2018). *Crossroad, A Popular History of Malaysia and Singapore*. Marshall Cavendish Editions.
- Bass, J. R. (1970). Malaysia : Continuity or Change ? *Asian Survey*, 10(2), 152–160.
- Butwell, R. (1969). *Southeast Asia Today-And Tomorrow: Problems of Political Development*. Praeger Publishers.
- Comber, L. (2012). *13 May 1969, The Darkest Day in Malaysian History*. Marshall Cavendish Editions.
- Dahana, A. (2022). *Perang Dingin, Tiongkok, Malaya, dan Malaysia, 1949-1974*. Penerbit Buku Kompas.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Penerbit Ombak.
- Drummond, S., & Hawkins, D. (1970). The Malaysian Elections of 1969 : An Analysis of the Campaign and the Results. *Asian Survey*, 10(4), 320–335. <https://www.jstor.org/stable/2642443>
- Esa, M. S., Ationg, R., Othman, I. W., & Jupiter, H. (2021). Isu dan Cabaran Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Kebangsaan Di Ambang Kemerdekaan Tanah Melayu. *International Journal of Education, Psychology and Counseling*, 6(41), 111–125. <https://doi.org/10.35631/ijepc.641009>
- Gottschalk, L. (2015). *Mengerti Sejarah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Hawkins, D., & Drummond, S. (1969). The Malaysian Elections of 1969 : Crisis for the Alliance. *The World Today*, 25(9), 394–403.
- Jabatan Penerangan Malaysia. (2021). *Ini Janji Kita, 5 Prinsip Rukun Negara*. Jabatan Penerangan Malaysia.

- Kay, J., & Gwen Chi. (2003). National-Ethnic Identity Negotiation in Malaysia and Singapore : A State-Society Interaction Perspective. *Berkeley Journal of Sociology*, 47, 49–75.
- Kementerian Kebudayaan Singapura (Ed.). (1965). *Percheraian, Kemerdekaan Singapura Pada 9hb Ogos 1965*. Penerbitan Kementerian Kebudayaan.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Penerbit Tiara Wacana.
- Latif, S. (1976). *Suka Duka Politik: Tun Razak*. Amir Enterprise.
- Leo Ah-Bang. (1975). New Directions in Malaysia. *Southeast Asian Affairs*, 1975(1), 87–97. <https://doi.org/10.1355/seaa75k>
- Majelis Gerakan Negara Malaysia (Ed.). (1969). *Trajedi 13 Mei Laporan*.
- Mamat, M. A. A., Saat, I., Husin, A. Z., & Sulaiman, R. (2020). Involvement of The Communist Era in 13 Mei 1969 Racial Riot. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 9(2), 69–80. <https://doi.org/10.6007/ijarped/v9-i2/7229>
- Marzali, A. (2021). Isu Ketuanan Melayu Di Malaysia. *Jurnal Pengajian Melayu*, 32(2), 1–16. <https://doi.org/10.22452/jomas.vol32no2.1>
- Means, G. P. (1972). “Special Rights” as a Strategy for Development: The Case of Malaysia. *Comparative Politics*, 5(1), 29–61. <https://doi.org/10.2307/421353>
- Milne, R. S. (1970). “National Ideology” and Nation-Building in Malaysia. *Asian Survey*, 10(7), 563–573. <http://www.jstor.org/stable/2642955>
- Milne, R. S. (1976). The Politics of Malaysia’s New Economic Policy. *Pacific Affairs*, 49(2), 235. <https://doi.org/10.2307/2756067>
- Milne, R. S., & Mauzy, D. K. (1973). Malaysia Today. *Current History*, 65(388), 262–265. <https://doi.org/10.1525/curh.1973.65.388.262>
- Mohamad, M. (1982). *The Malay Dilemma*. Federal Publications.
- Mohd Rus, A. K. A., Mohd Rosli, M. K. A., & Johar, S. N. A. (2021). Pilihan Raya di Persekutuan Tanah Melayu, 1948-1959 dan Pengenalan First Past the Post. *Akademika*, 91(3), 63–77. <https://doi.org/10.17576/akad-2021-9103-06>
- Morais, J. V. (1984). *Mahathir, A Profile in Courage*. Eastern Universities Press (M) Sdn. Bhd.

- Muslim, N., Hassan, Z., & Samian, A. L. (2011). Bahasa Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan: Kedudukan dan Peranannya dalam Konteks Komunikasi Perpaduan. *Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation*, 29(1), 103–120.
- Mutalib, H. (1996). *Islam dan Etnisitas*. LP3ES.
- Parlimen Malaysia. (1973). *Mid-Term Review of The Second Malaysian Plan 1971-1975*.
- Rahman, T. A. (1969). *May 13 Before & After*. Utusan Melayu Press Limited.
- Rambely, N. A. S., & Haniffa, M. A. (2018). Dinamika Pembentukan Komuniti Dalam Sejarah Malaysia: Pelajaran dari Persitiwa 13 Mei 1969. *E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial Dan Kemanusiaan, April*, 341–357. http://conference.kuis.edu.my/pasak3/images/eprosiding1/PASAK3_1125.pdf
- Ratnam, K. J., & Milne, R. S. (1970). The 1969 Parliamentary Election in West Malaysia. *Pacific Affairs*, 43(2), 203. <https://doi.org/10.2307/2755064>
- Short, A. (1970). Communism, Race and Politics in Malaysia. *Asian Survey*, 10(12), 1081–1089.
- Simandjuntak, B. (1985). *Federalisme Tanah Melayu 1945-1963*. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
- Wicks, P. (1971). The New Realism: Malaysia since 13 May, 1969. *The Australian Quarterly*, 43(4), 17. <https://doi.org/10.2307/20634465>